

# **Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki**

**Oleh: Ni Luh Arjani.**

## **Abstract**

Nowaday, the amount of the poor people generally in Indonesia and particularly in Bali is still so high. Most of this poverty condition can be fall by the woman. It is not only economic poverty, but also multidimensional poverty such as the limitation of access in education, politic, economy, information, healthy, etc.

The poverty feminization relates with the patriarchy culture which still develops in the society. Because of this culture mainly puts the woman in subordinate, the most marginal and the most discrimination position. Therefore, the woman poverty has more specific character which needs a special handling for example by using poverty prevention approach with gender perspective

## **1. Pendahuluan**

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh semua negara di dunia, lebih-lebih di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Sampai tahun 2006, BPS memperkirakan hampir 17,4 % dari total penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin. Kondisi yang hampir sama terlihat juga pada masyarakat Bali.. Sampai bulan Mei 2006 jumlah rumah tangga miskin yang ada di Bali mencapai 17,9% ( BPS, 2006). Kondisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan masalah soial baik di tingkat nasional maupun regional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari semua elemen masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD. 45 yang secara eksplisit memberi amanat

kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu jika pemerintah melalaikan masalah kemiskinan berarti pula pelanggaran terhadap konstitusi ( Muhadjir, 2005; 183). Disamping itu, saat ini penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah, karena hal ini sudah menjadi komitmen global sejak dilaksanakan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) tahun 2000 yang telah menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk mencapai kesejahteraan penduduk tahun 2015.

MDGs telah menelorkan delapan butir kesepakatan yang meliputi: 1. memberantas kemiskinan dan kelaparan; 2. mencapai pendidikan dasar yang universal (pendidikan untuk semua) ; 3. mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. mengurangi jumlah kematian anak; 5. meningkatkan kesehatan ibu; 6. memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya; 7. menjamin kelestarian lingkungan; dan 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan ( Muliawan, 2007). Dari kedelapan kesepakatan ini masalah kemiskinan serta gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian didalamnya. Oleh karena itu, kesepakatan ini merupakan salah satu tantangan global bagi pemerintah Indonesia pada umumnya dan Bali khususnya untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015.

Berbicara tentang kemiskinan, pada dasarnya dapat didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu

dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal dan lain-lain.

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui berbagai program baik melalui pendekatan top down maupun bottom up . Program tersebut antara lain:: Usaha ekonomi desa (UED), jaring pengaman sosial (JPS), kredit usaha keluarga sejahtera (KUKESRA), P2WKSS, bantuan langsung tunai (BLT), community based development (CBD) dan lain-lain. Namun demikian sampai saat jumlah penduduk miskin baik di Indonesia secara umum maupun di Bali khususnya masih cukup menonjol.

## **2. Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki**

Ada pandangan di kalangan ilmuwan sosial bahwa kemiskinan sebenarnya tidak lahir dengan sendirinya dan juga bukan muncul tanpa sebab, tetapi kondisi ini banyak dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi dan politik. Jon Sobrino (1993) menelaah keberadaan orang miskin sebagai rakyat yang tertindas dalam dua perspektif. **Pertama;** pada tataran faktual, kemiskinan pada masyarakat yang sedang berkembang ternyata tidak hanya menyebabkan penderitaan yang tak berkesudahan, melainkan juga kematian manusia sebelum waktunya. Penindasan sistimatis dan konflik bersenjata telah memperburuk situasi mereka yang tertindas. **Kedua;** pada tataran historis-etis, penderitaan kaum miskin dan tertindas itu disebabkan oleh struktur-struktur yang tidak adil baik di tingkat lokal maupun global yang lebih jauh telah menghasilkan

kekerasan yang melembaga (*institutionalized violence*) dan korbannya pertamanya adalah mereka yang miskin ( Cahyono, 2005; 9).

Pandangan di atas memperkuat asumsi bahwa pada masyarakat yang budaya patriarkinya masih sangat kental seperti halnya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, penanganan masalah kemiskinan nampaknya memerlukan pendekatan tersendiri yang mungkin berbeda dengan penanganan kemiskinan di daerah yang matrilineal. Pada masyarakat dengan kondisi budaya yang sangat paternalistik, mereka yang berada pada posisi yang tertindas dan lemah akan lebih banyak yang miskin. Mereka ini adalah kaum perempuan, dimana pada masyarakat patrilineal perempuan menduduki posisi subordinat laki-laki, termarginal dan terdiskriminasi. Whitehead ( dikutip Cahyono dalam JP. 42 2005; 11) telah mendata bahwa lebih dari separo penduduk miskin di negara berkembang adalah kaum perempuan. Data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa dari 1,3 miliar warga dunia yang masuk katagori miskin, 70% nya adalah kaum perempuan Hal ini menguatkan terjadinya feminisasi kemiskinan yakni sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan dialami oleh kaum perempuan.

Kondisi yang tidak jauh berbeda kemungkinan juga terjadi di masyarakat Bali, namun sampai saat ini data pasti mengenai kemiskinan menurut jenis kelamin belum dapat diperoleh, karena pendataan kemiskinan hanya dilakukan berdasarkan unit rumah tangga (RTM). Dari 821.313 kepala keluarga (KK) penduduk Bali (sampai Mei 2006), sebanyak 147.044 KK (17,9%) diantaranya

masih tergolong KK miskin, jumlah ini tersebar di 9 Kabupaten/ Kota seperti tampak pada Tabel 1.1. (BPS, 2006). Dari jumlah RTM ini, sebagian besar kondisi miskin akan lebih dirasakan oleh kaum perempuan terutama perempuan ibu rumah tangga karena kalau dilihat dari komposisi penduduk Bali tahun 2006, sebagian besar penduduk umur 19 tahun ke atas adalah kaum perempuan. Mereka ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan juga lansia. Disamping itu dalam kehidupan rumah tangga, perempuan/ ibu rumah tangga secara budaya diberikan peran dan tanggung jawab pada urusan domestik. Ini artinya bahwa mereka menanggung beban untuk mengurus kepentingan konsumsi keluarga sehari-hari. Dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba kurang, maka perempuanlah yang paling merasakannya.

**Tabel: 1.1. Jumlah KK miskin di Bali Menurut Kab./Kota Tahun 2006.**

No.	Kab./Kota	Jumlah RT	Jlh. RTM	%
1.	Jembrana	67.738	6.998	10,33
2.	Tabanan	114.122	11.672	10,23
3	Badung	86.130	5.201	6,04
4	Gianyar	91.827	7.629	8,31
5	Bangli	56.541	13.191	23,33
6.	Karangasem	101.058	41.826	41,39
7	Buleleng	162.234	47.908	29,53
8	Denpasar	100.256	4.159	4,15
9	Kelungkung	41.407	8.460	20,43
	Total Bali	821.313	147.044	17,90

Sumber: Diolah dari data BPS, Mei 2006.

Kemiskinan yang dialami perempuan seperti tersebut di atas baru kemiskinan kalau dilihat dari satu sudut pandang kemiskinan karena alasan ekonomi. Ari Ujianto ( dikutip Amirudin dan Lita Purnama dlm JP.42.2005) menyebutkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan majemuk dalam arti kemiskinan yang terjadi bukan hanya kemiskinan sandang pangan, tetapi juga kemiskinan identitas, informasi, akses, partisipasi dan kontrol. Oleh karena itu menurutnya, sebagian besar perempuan Indonesia adalah miskin karena tidak hanya secara ekonomi mereka terkebelakang tetapi juga dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, politik, kesehatan dan lain-lain, partisipasi merekapun kurang diberi tempat. Hal ini yang pada gilirannya memunculkan feminisasi kemiskinan di masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya.

Sumber dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan menurut Muhadjir ( 2005, 166) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sitem distribusi resourcis yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.

Pada masyarakat Bali yang senyatanya menganut sistem kekerabatan patrilineal, budaya patriarkinya masih sangat kental. Pada sistem kekerabatan seperti ini nilai anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Anak laki-laki yang karena kedudukannya selaku pemikul dharma serta sebagai pewaris dan penerus keturunan (***purusa***) dalam keluarga, maka mereka akan merasa lebih superior dan berkuasa. sementara perempuan ada pada posisi inferior. Hal ini pada akhirnya akan membatasi akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya.

Pada dasarnya ada faktor struktural yang menyebabkan individu dalam keluarga dan masyarakat tidak mempunyai akses yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Salah satu hambatan struktural tersebut adalah adanya relasi gender (*gender relation*) yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari budaya yang sangat paternalistik. Pada masyarakat Bali kondisi seperti ini nampak dengan jelas karena sampai saat ini keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan lain-lain masih cukup menonjol.

Kemiskinan perempuan di bidang pendidikan misalnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Bali dimana pendidikan perempuan masih jauh lebih rendah dari pada tingkat pendidikan laki-laki. Hal ini terlihat pada beberapa indikator pendidikan yang secara nyata masih menunjukkan kesenjangan gender yang sangat menonjol seperti angka buta huruf, APK,APM dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk. Pada tahun 2005, angka buta huruf

penduduk perempuan mencapai 5,47% sedangkan laki-laki hanya 1,62%. Demikian juga pada indikator pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk., semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin sedikit perempuan yang tamat, seperti contohnya penduduk yang tamat sarjana (S1) perbandingan antara laki-laki dan perempuan 6,7% : 4,9%. Hal ini dipicu oleh oleh beberapa faktor antara lain: adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur; perempuan tidak dianggap investasi keluarga karena setelah menikah akan menjadi milik orang lain (suaminya).

Kondisi yang demikian ini menggambarkan bahwa terjadi feminisasi kemiskinan di bidang pendidikan. Miskin pendidikan akan berpengaruh terhadap kemiskinan pada aspek yang lainnya, seperti pada akses terhadap pekerjaan, politik dan pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak mempunyai sumberdaya pribadi berupa pendidikan dengan sendirinya akan sangat sulit untuk mengakses pekerjaan terutama di sektor formal yang relatif berupah tinggi. Wilayah pekerjaan mereka biasanya terbatas pada sektor informal yang berupah rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga.

Terbatasnya akses perempuan Bali khususnya terhadap kesempatan kerja dapat dilihat dari persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2005 mencapai 66,8%, sementara laki-laki 77,7%. (BPS, 2006; 65). Data ini menggambarkan bahwa cukup banyak perempuan usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan produktif, dan

ini berarti bahwa mereka secara ekonomis tidak mempunyai penghasilan yang bisa disumbangkan untuk kebutuhan keluarganya. Kondisi rumah tangga yang demikian ini biasanya rentan terhadap kemiskinan secara ekonomis.

Selain hal tersebut di atas, struktur budaya patriarki juga melahirkan keterbatasan perempuan dalam hal pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dalam keluarga, pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki, demikian juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Di ranah publik, eksistensi perempuan juga kurang diperhitungkan, terbukti dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang nota bene juga berperan sebagai pengambil keputusan. Di legislatif (DPRD Bali) hanya ada 4 perempuan dari 59 orang anggota dewan (6,8%), sedangkan yang menduduki jabatan struktural khususnya di Pemda Bali masing-masing eselon II. 6,8%, eselon III. 17,5% dan eselon IV. 28,2%. Jumlah perempuan penegak hukum seperti polisi hanya 4,1%, jaksa 36,1% dan hakim 25,6% ( Arjani, 2006).

Berbagai alasan dapat memicu feminisasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, antara lain: tertanamnya ideologi gender yang membakukan peran perempuan pada sektor domestik dan laki-laki di ranah publik. Hal inilah yang membawa dampak luas bagi keterbelakangan perempuan.

### **3. Penutup**

Pada dasarnya kunci utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera adalah melepaskan penduduk dari jeratan kemiskinan. Sampai saat ini

jumlah penduduk miskin yang ada di Bali masih cukup tinggi dan kondisi kemiskinan ini lebih banyak dialami dan dirasakan oleh kaum perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan tidak hanya kemiskinan ekonomis, tetapi juga kemiskinan multidimensional seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, politik, ekonomi, informasi, kesehatan dan lain-lain.

Feminisasi kemiskinan yang demikian ini erat kaitannya dengan masih kuatnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Karena kultur ini pada intinya meletakkan kaum perempuan pada posisi subordinat, termarginal dan terdiskriminasi. Oleh karena itu, kemiskinan yang dialami oleh perempuan bersifat spesifik sehingga juga diperlukan penanganan yang khusus seperti halnya pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berperspektif gender.

Pustaka.

Arjani. Ni Luh (ed), 2006; Statistik Gender dan Analisis Provinsi Bali; Denpasar; BPS,PSW dan Biro. P.P.

Amirudin, Mariana dan Lita Purnama, 2005. Tragedi Kelaparan Nasional dan Feminisasi Kemiskinan. Dalam Jurnal Perempuan; Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan.

Badan Pusat Statistik, 2006; Pendataan Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Bali, Per 31 Mei 2006.

Cahyono, 2005: "Wajah Kemiskinan Wajah Perempuan" dalam Jurnal Perempuan. No. 42. Jakarta Yayasan Jurnal Perempuan.

Muhadjir, 2005; Negara dan Perempuan. Yogyakarta. CV. Adipura.

Muliawan, Partha; 2007. Perempuan dan HIV/AIDS. Makalah Seminar Nasional Peran gender dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. Denpasar. 2007.